

## PERAN IKHWANUL MUSLIMIN DALAM PERUBAHAN SOSIAL POLITIK DI MESIR

Umma Farida

STAIN Kudus, Jawa Tengah Indonesia

Mafarahman@gmail.com

### Abstract

*THE IKHWANUL MUSLIMIN'S ROLE IN SOCIO-POLITICAL CHANGE IN EGYPT. This research aims to know the position of the Ikhwanul Muslimin movement which grow and develop in Egypt. Trace the genealogy and the history of the Ikhwanul Muslimin, the concept and movement as well as the Ikhwanul Muslimin figures who influence on socio-political movement in Egypt. In addition to the position description of the Ikhwanul Muslimin, the study also tried to reveal the influence of the Ikhwanul Muslimin against the socio-political changes in the country of Kinanab. Since the founding of the Ikhwanul Muslimin, the political map in Egypt is entering a new chapter. The policy of leaders in power in Egypt is experiencing changes and ups and downs, related to its interaction with the Ikhwanul Muslimin. The interaction between Ikhwanul Muslimin and the Government of Egypt was mapped in two periods: pre-revolution and post-revolution. The Ikhwanul Muslimin and the Government of Egypt often tinged the existence of a conspiracy, suppression, which are then greeted with demonstration and competition power grab.*

**Keywords:** *Ikhwanul Muslimin, Revolution, Ideology, Authoritarianism.*

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi gerakan Ikhwanul Muslimin yang tumbuh dan berkembang di Mesir. Melacak genealogi dan sejarah Ikhwanul Muslimin, konsep dan gerakannya serta tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berpengaruh terhadap gerakan sosial politik di Mesir. Selain mendeskripsikan posisi Ikhwanul Muslimin, penelitian ini juga mencoba mengungkapkan pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap perubahan sosial politik di negeri Kinanah. Sejak berdirinya Ikhwanul Muslimin, peta politik di Mesir memasuki babak baru. Kebijakan para pemimpin yang berkuasa di Mesir mengalami perubahan dan pasang surut, berkaitan interaksinya dengan Ikhwanul Muslimin. Interaksi Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir penulis petakan dalam dua periode, yaitu: pra-revolusi dan pasca-revolusi. Pergulatan Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir sering dinikmati adanya konspirasi, penindasan, yang kemudian disambut dengan demonstrasi dan persaingan merebut kekuasaan.*

**Kata Kunci:** *Ikhwanul Muslimin, Revolusi, Ideologi, Otoritarianisme.*

## A. Pendahuluan

Di tengah ingar-bingarnya gerakan aktivis Muslim kontemporer di seluruh penjuru dunia, Ikhwanul Muslimin tampil sebagai organisasi dakwah yang berpengaruh di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang mampu membaca aspirasi masyarakat sekitarnya, sehingga platform dan gerakan dakwah yang dilakukannya tidak lepas dari masyarakat. Bahkan tidak hanya dalam wilayah dakwah, melainkan lebih luas lagi, memasuki wilayah sosial dan politik. Sebagaimana dikemukakan Hassan Al-Banna bahwa Ikhwanul Muslimin tidak menafikan gerakan sosial politik, asal ia diperuntukkan bagi perbaikan umat (*islah al-ummah*).<sup>1</sup>

Eksistensi Ikhwanul Muslimin dalam perjalanan politik di Mesir, juga sangat strategis. Mereka ikut terlibat dalam perjuangan revolusi era Gamal Abdunnasser, menumbangkan Raja Faruq, dan ikut serta dalam mengubah bentuk pemerintahan Mesir

---

<sup>1</sup> Fathi Yakan, *Revolusi Hassan al-Banna: Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Qutbb sampai Rasyid al-Ghannusy* (Jakarta: Harakah, 2002), hlm. viii.

dari Kerajaan menjadi Republik. Tidak cukup di sini, Ikhwan juga aktif dalam menghidupkan iklim demokrasi di Mesir di era kepemimpinan Anwar Sadat dan Husni Mubarak. Sehingga, diasumsikan Ikhwanul Muslimin memberikan peran yang sangat besar dalam perubahan sosial politik di negara piramida ini. Namun, sejauh mana peran yang dimainkan oleh Ikhwanul Muslimin ini?

Ada dua periode pemerintahan di Mesir yang melibatkan Ikhwanul Muslimin; baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melalui interaksi konfrontatif-radikal maupun moderat. Yaitu, pra-revolusi dan pasca-revolusi (yang melibatkan tiga kepemimpinan: Gamal Abdunnasser, Anwar Sadat, dan Husni Mubarak). Kebijakan mereka dan beberapa perdana menteri yang berkuasa di Mesir mengalami perubahan dan pasang surut, berkaitan interaksinya dengan Jamaah Ikhwanul Muslimin.

Keterlibatan Ikhwanul Muslimin ini berdampak signifikan bagi interaksi gerakan Islam dengan pemerintah. Pada akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an membawa banyak kontak interaksi antara beberapa anggota Jamaah Ikhwanul Muslimin dengan anggota Perwira Bebas Mesir yang mencapai kekuasaan pada Juli 1952. Tak lama setelah itu, Ikhwanul Muslimin mampu memainkan peran secara organisasional dan ideologis yang dominan dalam rezim baru Mesir yang dibangun oleh Gamal Abdunnasser dan perdana menterinya. Bahkan saat itu semua partai politik dilarang, kecuali Ikhwanul Muslimin yang tidak dianggap sebagai partai politik, walaupun untuk sementara waktu mereka memainkan peran sebagai organisasi politik.<sup>2</sup> Berbagai hubungan dengan para Perwira Bebas tersebut memungkinkan mereka lolos dari resiko pembubaran setelah kudeta, karena mereka dikelompokkan sebagai suatu "gerakan" atau "jamaah", dan bukan sebagai partai politik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>L. Carl Brown, *Wajah Islam Politik: Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat* (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 211.

<sup>3</sup>John L. Esposito, *Dunia Islam Modern*, jilid II (Bandung: Mizan, 2001),

Ada beberapa faktor yang sangat penting dikaji guna memahami peranan Ikhwanul Muslimin dalam kebangkitan Islam dan interaksinya dengan pemerintah Mesir. *Pertama*, apakah gerakan Ikhwanul Muslimin itu berdiri secara legal atau ilegal, dan apakah status ini berubah karena perubahan waktu? *Kedua*, sejauh mana gerakan Ikhwanul Muslimin dapat disebut sebagai gerakan aktivis atau gerakan oposisi terhadap sistem yang ada, atau dalam hal apa Ikhwanul Muslimin bersedia bekerjasama dengan pemerintah yang ada? *Ketiga*, menyangkut sikap penguasa politik terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin, apakah negara menindas gerakan-gerakannya, atau apakah ada kesempatan partisipasi politik tanpa kekerasan bagi gerakan Ikhwanul Muslimin? Kondisi-kondisi ini membentuk kerangka yang di dalamnya ada gerakan Ikhwanul Muslimin yang berinteraksi dengan berbagai struktur negara dan sistem politik di Mesir.

## **B. Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tiga teori, yaitu: teori sosiologi politik, teori perubahan sosial dan teori perubahan sistem politik. Untuk itu, penulis akan menguraikan satu persatu tentang teori sosiologi politik, teori perubahan sosial, dan teori perubahan politik yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **1. Teori Perubahan Sosial**

Institusi sosial dapat berubah karena terjadinya perubahan pada institusi lain atau karena terjadinya gerakan sosial. Stratifikasi sosial pun dapat berubah melalui mobilitas sosial.<sup>4</sup> Beberapa teori perubahan sosial, seperti teori Karl Marx mengenai perubahan sistem feodal menjadi kapitalis dan kemudian sosialis, teori Weber mengenai munculnya kapitalisme dalam masyarakat feodal, dan teori Durkheim mengenai perubahan solidaritas mekanik menjadi

---

hlm. 268.

<sup>4</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Universitas Indonesia Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Edisi II, 2000), hlm. 213.

organik telah banyak membahas tentang tahapan-tahapan perubahan ini.

Perubahan sosial menurut para tokoh sosiologi klasik dapat digolongkan ke dalam beberapa pola. *Pertama*, ialah pola *liniar*; menurut pemikiran ini perkembangan masyarakat mengikuti suatu pola yang pasti. Contoh yang diberikan Etzioni-Halevy mengenai pemikiran linear ini adalah karya Comte dan Spencer. Menurut Comte, kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama, dan tak terelakkan. Dalam teorinya yang dikenal dengan nama "Hukum Tiga Tahap", Comte mengemukakan bahwa sejarah memperlihatkan adanya tiga tahap yang dilalui peradaban, yaitu tahap teologis dan militer, tahap metafisik dan yuridis, serta tahap ilmu pengetahuan dan industri. Sedangkan Spencer mengemukakan bahwa struktur sosial berkembang secara evolusioner dari struktur yang homogen menjadi heterogen. Perubahan struktur ini berlangsung dengan diikuti perubahan fungsi. Suku atau kelompok yang sederhana bergerak maju secara evolusioner ke arah lebih besar, keterpaduan, kemajemukan, dan kepastian sehingga terjelma suatu bangsa yang beradab.

*Kedua*, pola *siklus*. Menurut pola ini, masyarakat berkembang laksana suatu roda; kadang kala naik ke atas, kadang kala turun ke bawah. Menurut Oswald Spengler, kebudayaan tumbuh, berkembang dan pudar laksana perjalanan gelombang, yang muncul mendadak, berkembang dan kemudian lenyap; atau laksana tahap perkembangan seorang manusia, melewati masa muda, masa dewasa, masa tua, dan akhirnya punah. Pandangan mengenai siklus ini juga bisa kita jumpai dalam karya Vilfredo Pareto yang mengemukakan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat dua lapisan, lapisan bawah atau non elite dan lapisan atas atau elite, yang terdiri atas kaum aristokrat dan terbagi lagi dalam dua kelas; elite yang berkuasa dan elite yang tidak berkuasa. Menurut Pareto, aristokrasi senantiasa akan mengalami transformasi; sejarah menunjukkan bahwa aristokrasi hanya dapat bertahan

untuk jangka waktu tertentu saja dan akhirnya akan pudar untuk selanjutnya diganti oleh suatu aristokrasi baru yang berasal dari lapisan bawah.

*Ketiga*, gabungan kedua pola di atas di antaranya adalah teori konflik Karl Marx. Pandangan Marx, sejarah manusia merupakan sejarah perjuangan terus menerus antara kelas-kelas dalam masyarakat yang sebenarnya mengandung pandangan siklus, karena setelah suatu kelas berhasil menguasai kelas lain, menurutnya siklus serupa akan berulang lagi. Pandangan lain tentang pemikiran siklus adalah teori Max Weber yang membedakan antara tiga jenis wewenang: kharismatik, rasional-legal dan tradisional.

Tiga pola di atas merupakan teori perubahan sosial menurut para tokoh sosiologi klasik. Ada benang merah antara teori-teori klasik dan teori-teori modern; sebagaimana halnya dengan pandangan mengenai perkembangan masyarakat secara linear yang dikemukakan oleh tokoh klasik seperti Comte dan Spencer, maka teori-teori modernisasi pun cenderung melihat bahwa perkembangan masyarakat dunia ketiga berlangsung secara evolusioner, masyarakat bergerak ke arah kemajuan dari tradisi ke modernitas.

## **2. Teori Perubahan Sistem Politik**

Setiap sistem politik memiliki kekuatan dan kelemahan, sebagian inheren dalam sifat manusia, mencerminkan sifat dan tradisi masyarakat, bersifat struktural, kontemporer dan minor, serta merupakan harga kemajuan karena prestasi lembaga-lembaga politik yang ada. Sistem politik ini, bagaimanapun kekuatan dan kelemahannya, juga mengalami perubahan. Sebagian perubahan terjadi secara nyata dan sebagian lagi tidak dapat dipahami; sebagian perubahan berasal dari tindakan sengaja dan lainnya karena ketidaksengajaan; sebagian karena kemajuan dan yang lainnya karena kegagalan; sebagian melalui pertumbuhan dan lainnya melalui kelapukan, serta sebagian berlangsung cepat dan sebagian berlangsung lambat.

Dalam setiap hal, perubahan sudah merupakan hukum kehidupan, baik di zaman kuno maupun pada tahun 1984, dalam kapitalisme maupun sosialisme, dalam diktator maupun dalam demokrasi. Salah satu masalah utama yang dihadapi individu maupun penguasa negara ialah memandang perlunya transformasi dan pengarahannya untuk perubahan sesuai dengan arah yang mereka rasa berguna dan bermanfaat, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tak seorang pun untuk waktu yang lama, dapat menahan kekuatan-kekuatan yang membutuhkan perubahan tanpa menimbulkan revolusi.<sup>5</sup>

Dalam suatu masyarakat demokratis yang terbuka, perubahan sistem politik berlangsung terus dan permanen. Perubahan ini biasanya terjadi secara damai dan perlahan-lahan, walaupun sering pula tidak secara mudah. Dalam suatu sistem diktator atau sistem otoriter, beberapa perubahan berasal dari desakan arus bawah dan meluas ke seluruh masyarakat. Namun sistem membatasi dan berusaha mengarahkan arus informasi dan inovasi, karena dalam sistem ini perubahan-perubahan besar membutuhkan persetujuan, bahkan keputusan pemimpin.

Setiap orang menyadari bahwa perubahan sistem politik mempengaruhi hidupnya sehari-hari dan peranannya di masa depan, sehingga ia harus menyesuaikan diri dengan faktor-faktor inovasi yang penting baginya. Sama halnya, setiap sistem politik pasti harus menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan mengubah cara pandang mereka terhadap masa depan. Sehingga setiap orang, penguasa, negara, dan sistem politiknya harus tanggap mengendalikan munculnya berbagai kekuatan baru dan memperkenalkan perubahan ini.

### **3. Metode Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian deskriptif-eksplanatif-

---

<sup>5</sup>Robert F. Byrnes, *Perubahan dalam Sistem Politik Soviet*, dalam Roy C. Macridis, *Perbandingan Politik; Catatan dan Bacaan* (Jakarta: Airlangga, 1992), hlm. 211-212.

analitis. Metode ini bermaksud menjelaskan hakekat fakta tertentu, mengapa suatu fakta terjadi, pengaruh dan bagaimana hubungannya dengan fakta yang lain. Data penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data, baik kepustakaan maupun wawancara terstruktur mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin dan politik Mesir, serta materi-materi lain yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

Data-data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang berbahasa Indonesia, Arab dan Inggris. Selain itu, data tersebut akan digali melalui wawancara dengan pelaku atau orang-orang yang mengetahui masalah ini. Data primer terdiri dari karya-karya yang ditulis oleh para intelektual Muslim dan laporan-laporan jurnalistik (media massa) yang diterbitkan dan hasil wawancara mengenai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Sedangkan sumber sekunder mencakup publikasi-publikasi ilmiah mengenai Ikhwanul Muslimin dan politik Mesir.

#### **4. Temuan Penelitian**

Temuan penelitian ini antara lain adalah bahwa peran Ikhwanul Muslimin dalam perubahan sosial politik di Mesir sangat besar melalui proses interaksi tokoh-tokoh dan jemaah Ikhwanul Muslimin dengan para pemimpin Mesir.

##### **a. Pertumbuhan dan Perkembangan Ikhwanul Muslimin**

Di Mesir, tidak diragukan lagi bahwa gerakan paling kuat dan paling fenomenal di antara berbagai gerakan ini adalah Jamaah Ikhwanul Muslimin,<sup>6</sup> yang memulai aktivitasnya di Mesir menjelang usainya masa penjajahan militer tahun 1928. Gerakan ini terus beraktivitas dan menunjukkan kegigihannya berjuang hingga sekarang. Organisasi yang dirintis oleh Hasan al-Banna ini merupakan induk dan sumber inspirasi utama bagi banyak organisasi Islamis di Mesir dan di beberapa negara Arab lainnya;

---

<sup>6</sup> Taufiq Yusuf al-Wa'iy, *Pemikiran Politik Kontemporer Ikhwanul Muslimin; Studi Analitis, Observatif, dan Dokumentatif* (Solo: Era Intermedia 2003), hlm. 38.

termasuk Suriah, Sudan, Yordania, Kuwait, Yaman dan sebagian negara di Afrika Utara.

Dakwah Ikhwanul Muslimin dimulai dari kota Ismailiah, Mesir. Pada bulan Zulkaidah 1346 H/ Maret 1928,<sup>7</sup> enam orang tokoh Ismailiah datang menemui al-Banna setelah mendengar ceramah-ceramah al-Banna yang menarik dan mendalam membicarakan pembentukan sebuah perkumpulan Islam. Keenam tokoh itu adalah: Hafidz Abdul Hamid, Ahmad al-Hushary, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi.

Perkembangan Ikhwan di Ismailiah sangat pesat dan sudah menembus ke beberapa kota di sekitar Ismailiah, seperti: Syubrakhit, Mahmudiyah, Abu Syuwair, Port Said, Bahr Shaghbir, Suez dan Balah. Namun proses yang mereka jalani tidak selamanya mulus. Mereka menghadapi berbagai rintangan serta menanggung berbagai cobaan. Banyak sekali tulisan di berbagai media massa saat itu yang bernada memojokkan dan memfitnah aktivitas mereka. Walau demikian, semua itu tidak sedikit pun menghambat aktivitas dakwah mereka.<sup>8</sup>

Dakwah Ikhwanul Muslimin di Ismailiah yang hanya membutuhkan waktu beberapa tahun, berkembang sangat pesat. Dengan hasil penelitian yang sangat cermat, Richard Mitchell menyajikan angka-angka berikut ini: "Tahun 1929 Ikhwanul Muslimin telah mempunyai 4 cabang, tahun 1930 mempunyai 5 cabang, tahun 1931 memiliki 10 cabang, tahun 1932 memiliki

---

<sup>7</sup> Dalam beberapa buku yang menulis tentang Ikhwanul Muslimin disebutkan bahwa Jamaah ini mulai tumbuh pada bulan Zulkaidah 1947 H. Pendapat ini, setelah dicek oleh Ali Abdul Halim Mahmud ternyata salah. Setelah dilakukan penelitian ternyata yang bertepatan dengan bulan Maret 1928 adalah bulan Zulkaidah 1346 H. Ia pun mengakui salah ketika mencantumkan tanggal ini dalam bukunya yang berjudul: *Sarana Pendidikan Ikhwanul Muslimin*, karena itu ia meralatnya. Lihat Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan terpadu*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 25.

<sup>8</sup> Al-Banna, Imam Hasan, *Catatan Ikhwanul Muslimin kepada Menteri Keadilan tentang Kewajiban Mengamalkan Syari'at Islam*, Kairo: Dâr asy-Syihab, tt.), hlm. 122.

15 cabang, tahun 1938 mempunyai 300 cabang, tahun 1940 terbentuk 500 cabang, dan pada tahun 1949 ada 2.000 cabang, dengan jumlah anggota sekitar 500.000 orang.<sup>9</sup>

Sejak Oktober 1932, pusat kegiatan Ikhwanul Muslimin berpindah ke Kairo, bersamaan dengan dipindahtugaskannya Al-Banna sebagai guru ke sekolah Abbas pertama di kawasan Sabtiah, Kairo. Tepatnya di sebuah gedung kampung Nafi' no. 24, Srujiah, kegiatan Ikhwan dikoordinir. Selama tujuh tahun (dari tahun 1932 sampai tahun 1939) markas umum mereka selanjutnya berpindah-pindah ke beberapa tempat, yakni dari kampung Nafi' No. 24, kemudian pindah ke Souk Silah, kemudian pindah ke kampung Syumasyarji no. 5, kemudian pindah ke jalan Nashiriah no. 13, kemudian pindah ke lapangan Al-Atabah gedung Aukaf no. 5, dan kemudian pindah ke jalan Ahmad Bey Umar di Al-Helmiah no. 13.

Pada tanggal 22 Shafar 1350 H/1931, Ikhwanul Muslimin mengadakan musyawarah nasional atau muktamar pertama di kota Ismailiah. Muktamar ini kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Kedua atau Muktamar Nasional Kedua di kota Port Said, pada bulan Syawal 1350 H/1932 M, yang dihadiri oleh pemimpin umum dan para utusan cabang Ikhwanul Muslimin yang tersebar di seluruh Mesir. Pada bulan Mei 1933, Ikhwanul Muslimin menerbitkan majalah mingguan yang bernama majalah *Ikhwanul Muslimin*, dimana pemimpin redaksinya adalah seorang penulis terkenal, Muhibuddin Al-Khathib. Kemudian, terbit juga *An-Nadzir* pada tahun 1357 H/1938 M dan *Ayy-Syihab* pada tahun 1367 H/1947 M. Majalah-majalah tersebut merupakan penyambung aspirasi Ikhwanul Muslimin yang sangat tajam.

Pada bulan DzulHijjah 1353 H/1935 M, Ikhwanul Muslimin mengadakan Muktamar Nasional ketiga di kota Kairo. Dalam Muktamar ini mereka berhasil mengeluarkan berbagai keputusan

---

<sup>9</sup>Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 1991, hlm. 102. Lihat juga dalam Richard Mitchell, *The Society of Muslim Brothers (Ikhwanul Muslimin)* (London: Oxford University Press, 1969), hlm. 328.

penting, di antaranya: percetakan Ikhwanul Muslimin, surat kabar Ikhwanul Muslimin, strategi dakwah Ikhwanul Muslimin, sikap Ikhwanul Muslimin terhadap pihak-pihak lain, pembentukan tata administratif Ikhwanul Muslimin dan reformasi keuangan. Pada bulan Muharram 1357 H/ Maret 1938 M, Ikhwanul Muslimin mengadakan konferensi besar yang diikuti oleh pelajar/mahasiswa baik dari dalam maupun dari luar Mesir. Hal ini merupakan bukti keseriusan Ikhwanul Muslimin dalam memperhatikan kegiatan mahasiswa. Konferensi ini dibarengi dengan penyusunan konsep pengajaran agama. Ketua Umum menemui Syekh Al-Maraghi, Syekh Al-Azhar saat itu. Ia memberikan ceramah yang memukau tentang pendidikan agama. Manshur Pasha Fahmi, dekan fakultas Adab, yang ikut mendengarkan ceramah tersebut sangat kagum dan terkesan dengannya.

Pada tanggal 13 Dzulhijjah 1357 H/Januari 1939, Ikhwanul Muslimin menyelenggarakan Munas V di kediaman Luthfullah di Giza. Munas ini termasuk pertemuan terpenting di antara pertemuan yang pernah diadakan oleh Ikhwanul Muslimin. Di tahun ini, Ikhwanul Muslimin berhasil mengelola penerbitan majalah Islam *al-Manâr*, setelah wafatnya Muhammad Rasyid Ridha dan setelah mengadakan perundingan dengan para ahli warisnya. Mereka mulai menerbitkan edisi ke-5 tahun ke-35, pada awal bulan Jumadil Akhir 1358 H/18 Juli 1939, dan selanjutnya terbit sampai lima belas edisi.

Pada bulan Dzulhijjah 1359 H/1941 M, Ikhwanul Muslimin mengadakan Munas VI. Dalam Munas ini diputuskan untuk membentuk dewan pendiri yang akan menjadi Majelis Syura Ikhwanul Muslimin. Majelis ini bertugas merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (*Hai'ab Ta'sisiyyah*) yang pertama bagi Ikhwanul Muslimin.<sup>10</sup> Keputusan Munas lainnya, yakni dibolehkannya anggota Jamaah ikut dalam pemilihan

---

<sup>10</sup> Imam Hasan al-Banna, *Majmū'ah Rasā'il al-Imām asy-Syāhid Hasan al-Banna: Hal Nabnu Qaumun 'Amaliyyūn*, al-Muassasah Al-Islamiyyah, 1979, Cet. I, hlm. 62.

umum untuk memilih anggota parlemen dan senat. Pada tahun yang sama, mengembangkan tim dakwah keliling yang dipimpin langsung oleh Imam Hasan al-Banna, dan dipilih pula Syaikh Mahmud Labib sebagai Inspektur Jenderal.

Setelah tersusunnya tim dakwah keliling, Ikhwanul Muslimin berkembang sangat pesat. Hal inilah yang membuat pemerintah Mesir khawatir, karena Ikhwanul Muslimin kritis terhadap kebijakan pemerintah. Banyak tekanan dari pemerintah Mesir saat itu, di antaranya adalah: dipindahkannya Hasan al-Banna secara paksa ke Qona, 20 Mei 1941, dibredelnya majalah-majalah yang berafiliasi ke Ikhwan, seperti *al-Manār*, *Syu'a*, dan *Ta'awun*. Al-Banna saat itu juga dikenai tahanan satu bulan bersama wakilnya, Ahmad as-Sukkary dan Abdul Hakim Abidin (Sekretaris).

Pada bulan Oktober 1944, setelah Ahmad Mahir Pasha yang bertanggung jawab menyusun kabinet membubarkan DPR dan mulai mempersiapkan pemilu, Ikhwanul Muslimin ikut bersaing dalam pemilu ini dengan program Islami. Namun, pemerintah berusaha menghalangi keberhasilan Ikhwanul Muslimin dalam persaingan pemilu itu dengan cara-cara klasik yang sering digunakan oleh pemerintah Mesir, di antaranya dengan memanipulasi hasil pemilu, menghalangi para calon dan menangkap para tokoh serta pendukung Ikhwanul Muslimin. Pada tahun yang sama Ahmad Mahir Pasha dibunuh setelah mengumumkan perang terhadap negara-negara lawan sekutu. Ia ditembak oleh salah seorang anggota Partai Nasional. Namun, pemerintah menuduh Ikhwanul Muslimin yang melakukan penembakan itu. Sehingga Imam pendiri, mandataris jamaah dan sekretarisnya ditangkap pemerintah. Mereka baru dilepaskan setelah pembunuh mengakui perbuatannya.

Setelah Ahmad Mahir Pasha meninggal, tampuk pemerintahan dipegang oleh Fahmi an-Nuqrasyi Pasha. Dia mencoba menerapkan berbagai peraturan ketat yang mengekang Ikhwanul Muslimin. Meski tak seorang pun anggota Jamaah

Ikhwanul Muslimin terlibat dalam pembunuhan pendahulunya itu, tetapi an-Nuqrasyi karena tekanan dari Inggris yang telah berjasa mengantarkannya ke puncak kekuasaan tetap menginginkan agar ruang gerak Ikhwanul Muslimin dibatasi.

Pada bulan Syawal 1364 H/2 September 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Ikhwanul Muslimin mengadakan pertemuan dalam sebuah majelis umum. Dalam pertemuan ini mereka menetapkan Dewan Pendiri, lalu kekuasaan dibagi menjadi Dewan Pendiri, Pemimpin Umum dan Pimpinan Pusat. Di tahun yang sama, setelah pemerintah Mesir mengeluarkan peraturan no. 49 tahun 1945 mengenai pengaturan berbagai perkumpulan dan lembaga sosial, Ikhwanul Muslimin membentuk suatu divisi yang diberi nama "Divisi Kebaikan dan Pelayanan Sosial Ikhwanul Muslimin." Divisi ini melakukan kegiatan sosial di lebih dari lima ratus cabang yang tersebar di seluruh Mesir. Di tahun yang sama pula, Ikhwanul Muslimin mengerahkan kegiatannya secara besar-besaran di kota-kota dan desa-desa dengan mengadakan muktamar-muktamar daerah, untuk menuntut dua hal: *pertama*, pengusiran Inggris dan kemerdekaan penuh untuk Mesir. *Kedua*, persatuan Lembah Nil (Mesir dan Sudan). Saat itu Inggris senantiasa berusaha memisahkan antara Mesir dan Sudan.

Pada awal tahun 1946, Ikhwanul Muslimin memusatkan perhatiannya pada kegiatan pelajar dan mahasiswa yang disponsornya di berbagai Universitas; Universitas al-Azhar dan Universitas lainnya untuk memperkuat dukungan terhadap masalah nasionalisme, serta memperluas gerakan mengutuk penjajah Inggris. Ikhwanul Muslimin mensponsori demonstrasi besar yang dilakukan mahasiswa selama dua hari, pada tanggal 9-10 Pebruari 1946, sebagai protes terhadap penolakan pemerintah Inggris atas memorandum yang dikirim pemerintah Mesir.<sup>11</sup> Memorandum ini meminta pemerintah Inggris untuk

---

<sup>11</sup> Mahmud Ali Abdul Halim, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*, *Op.Cit*, hlm. 38.

mengadakan negosiasi dengan pemerintah Mesir, demi kebebasan masyarakat Mesir.

Demonstrasi yang semula dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar Islam saja, ternyata dalam perkembangannya berhasil menarik perhatian sejumlah kalangan, khususnya dari kelompok nasionalis yang merasa tertekan oleh penjajahan Inggris. Demonstrasi ini dikenal dengan nama "Demonstrasi Jembatan Abbas." Karena pasukan keamanan tidak mampu mengatasi massa, maka mereka membuka jembatan Abbas untuk menghadang gerak laju para demonstran dari Universitas Kairo, tempat dimulainya demo menuju ke tengah kota dekat sungai Nil.

Demonstrasi ini cukup berhasil yang ditandai dengan mundurnya pemerintahan an-Nuqrasyi Pasha pada tanggal 15 Pebruari 1946, lima hari setelah demonstrasi tersebut. Penggantinya adalah sistem kabinet yang dipimpin oleh Ismail Shidqi Pasha. Pada tahun itu pula Ikhwanul Muslimin menghadapi serangan dan fitnah keji yang dilancarkan oleh partai Wafd dan Komunis. Hal inilah yang membuat Ikhwanul Muslimin semakin kritis terhadap pemerintah dan kelompok lain.

Pada tahun 1365 H, tepatnya pada bulan Mei 1946, Ikhwanul Muslimin mendapatkan izin menerbitkan surat kabar *Ikhwanul Muslimin*. Dengan terbitnya surat kabar ini, terlihat titik perubahan di bidang dakwah dan informasi. Ikhwanul Muslimin lebih leluasa untuk menyalurkan aspirasinya. Atas nama jamaah, pemimpin Ikhwanul Muslimin mengumumkan bahwa berbagai negosiasi dengan Inggris tidak ada artinya. Ia mengimbau untuk menyiapkan kekuatan, karena hak tidak akan dapat diraih begitu saja, namun harus dengan kekuatan dan jihad.

Pemerintah tidak menyetujui pernyataan dan pengumuman tersebut. Sehingga mengambil beberapa tindakan terhadap Jamaah Ikhwanul Muslimin, yakni: melarang segala bentuk pertemuan yang diselenggarakan oleh Ikhwanul Muslimin, menghentikan kegiatan dakwah keliling yang biasa dilakukan

Ikhwanul Muslimin secara total, sebagai antisipasi terhadap kegiatan mereka yang menentang pemerintah dan menangkap aktivis Ikhwanul Muslimin tanpa alasan yang jelas.

Pada tahun yang sama, Ikhwanul Muslimin menetapkan satu hari yang dinamakan dengan "Hari Pembakaran." Pada hari itu semua surat kabar, majalah dan buku berbahasa Inggris dibakar di berbagai lapangan terbuka, sebagai ungkapan kebencian mereka terhadap Inggris. Dalam menghadapi peristiwa ini, pemerintahan Shidqi Pasha mengeluarkan kebijakan di luar batas, yakni memerintahkan penangkapan sejumlah besar aktivis Ikhwanul Muslimin, menutup universitas dan sekolah, menyita berbagai surat kabar dan majalah, serta menangkap mandataris Ikhwanul Muslimin. Imam Hasan sendiri saat itu sedang berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Akibatnya, gejolak yang terjadi tidak bisa dibendung dan reaksi pemerintah pun semakin dahsyat. Namun akhirnya, Shidqi Pasha resmi mengundurkan diri, pada tanggal 8 Desember 1946.

Setelah Shidqi Pasha mengundurkan diri, an-Nuqrasyi Pasha kembali merebut kekuasaan dan membentuk kabinetnya pada tanggal 9 Desember 1946. Ikhwanul Muslimin pun berhati-hati dalam berinteraksi dengan pemerintahan an-Nuqrasyi Pasha, sehingga ada kalanya mereka mendukung an-Nuqrasyi Pasha, jika kebijakannya memihak rakyat dan umat Islam. Namun tak jarang mereka melakukan kecaman dan demonstrasi, jika kebijakannya merugikan kemashlahatan rakyat Mesir dan umat Islam. Pada tahun 1948, Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam peperangan Palestina. Mereka memasuki medan pertempuran dengan membawa pasukan-pasukan khusus. Para sukarelawan Ikhwanul Muslimin bahu-membahu dengan pasukan Mesir dan Palestina menghadapi Israel. Kamil asy-Syarief telah mengabadikan peristiwa peperangan itu dengan terperinci di dalam bukunya, *al-Ikhwān al-Muslimīn fī Ḥarb Falistīn* (Ikhwanul Muslimin dalam Perang Palestina).

Keberanian Ikhwanul Muslimin menjadikan kekuatan mereka semakin besar, dan hal ini membuat kekhawatiran pemerintah akan kekuatan kelompok Ikhwan. Sehingga, Raja Farouk melalui pemerintahan an-Nuqrasyi Pasha mengeluarkan keputusan untuk membubarkan Ikhwanul Muslimin pada 8 November 1948.<sup>12</sup> Keputusan tersebut diambil oleh an-Nuqrasyi Pasha setelah mendapatkan memo dari sebuah konferensi yang diadakan oleh beberapa konsul negara-negara Barat, seperti Inggris, Perancis, dan Amerika. Para konsul tersebut meminta Duta Besar Inggris di Mesir dan memohon kepada an-Nuqrasyi Pasha (kepala pemerintah Mesir) untuk membubarkan Ikhwanul Muslimin, menyita harta dan kekayaannya, menangkap orang-orangnya, memutarbalikkan fakta tentang mereka, menyiksa aktivisnya dan memaksa mereka untuk meninggalkan Ikhwanul Muslimin.<sup>13</sup>

Namun pada 28 Desember 1948, an-Nuqrasyi terbunuh. Pemerintah menuduh Ikhwanul Muslimin sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Para pendukung an-Nuqrasyi berteriak-teriak dalam upacara penguburannya, bahwa kepala an-Nuqrasyi harus dibalas dengan kepala al-Banna. Ternyata benar, tepat pada tanggal 12 Pebruari 1949 M, al-Banna dibunuh.<sup>14</sup>

Setelah meninggalnya an-Nuqrasyi, Kabinet an-Nuhas tampil pada tahun 1950 M. Ia membebaskan Ikhwanul Muslimin berdasarkan keputusan Majelis Tinggi Negara yang menetapkan bahwa perintah pembubaran organisasi Ikhwanul Muslimin tidak sah dan tidak berdasar sama sekali. Pada tahun yang sama, Hasan al-Hudaibi (1891-1973 M) terpilih menjadi *Mursyid 'Am* (Ketua Umum) Ikhwanul Muslimin. Dia merupakan salah seorang tokoh besar dalam dunia peradilan Mesir. Pada tahun 1954, dia dijatuhi

---

<sup>12</sup> Fathi Yakan, *Manhajiyah al-Imām asy-Syāhid Hasan al-Banna*, hlm. 15.

<sup>13</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*, hlm. 45.

<sup>14</sup> Fathi Yakan, *Manhajiyah al-Imām asy-Syāhid Hasan al-Bannā*, hlm.15

hukuman mati, tetapi kemudian diperingan menjadi hukuman seumur hidup, dan akhirnya dibebaskan pada tahun 1971.

Ketika Ikhwanul Muslimin dipegang oleh Hasan al-Hudaibi, ketegangan antara Inggris dan Mesir memuncak, khususnya pada bulan Oktober 1951 M. Sehingga Ikhwanul Muslimin mengadakan perang gerilya melawan Inggris di Terusan Suez. Peristiwa perang tersebut pun direkam oleh Kamil Asy-Syarief dalam bukunya, *al-Muqawwamah as-Sirriyyah fi Qanat as-Suwayz* (Perlawanan Bawah Tanah di Terusan Suez). Pada tanggal 23 Juli 1952 M perwira-perwira Mesir di bawah pimpinan Muhammad Najieb melakukan kudeta militer, yang dikenal dengan nama "Revolusi Juli." Ikhwanul Muslimin turut berperan dalam menyukseskan Revolusi Juli, namun setelah itu mereka menolak ikut serta dalam pemerintahan, karena menurut Ikhwanul Muslimin revolusi telah disalahgunakan.

Pasca revolusi, kedua belah pihak (Pemerintah dan Ikhwanul Muslimin) semakin menunjukkan kerenggangan, bahkan akhirnya memasuki masa-masa ketegangan dan permusuhan. Di bawah pemerintahan Gamal Abdun Nasser (1954-1970), Ikhwanul Muslimin mengalami masa-masa yang sulit. Pemerintah melakukan penahanan terhadap aktivis-aktivis Ikhwan pada tahun 1954 M dan mengasingkan ribuan anggota mereka, dengan dalih bahwa mereka telah mengancam nyawa, melalui upaya pembunuhan terhadap Gamal Abdun Nasser di alun-alun Al-Mansyiah di kota Iskandariah. Enam orang anggota Ikhwan dijatuhi hukuman mati, mereka adalah: Abdul Qadir Audah, Muhammad Farghalli, Yusuf Thal'at, Handawi Duwair, Ibrahim at-Thaib, dan Mahmud Abdul Lathif.

Beberapa tahun sesudahnya, tahun 1965-1966 M, terulang kembali bentrokan antara Ikhwanul Muslimin dan pemerintah, karena pemerintah sering melakukan penahanan dan penganiayaan. Bahkan tiga orang aktivis Ikhwanul Muslimin dijatuhi hukuman mati, yaitu: Sayyid Quthb (1324-1387 H/1906-1966 M), Yusuf Hawwas dan Abdul Fattah Ismail. Kondisi ini

berlangsung sampai wafatnya Presiden Gamal Abdun Nasser, pada 28 Pebruari 1970.

Presiden Anwar Sadat (berkuasa antara 1970-1981) yang menggantikan Gamal Abdun Nasser menerapkan strategi yang lebih lunak dan akomodatif terhadap Ikhwanul Muslimin. Pada masa ini terjadi pergantian kepemimpinan dalam tubuh Ikhwanul Muslimin, di mana Hasan al-Hudaibi digantikan oleh Umar Tilmisani.<sup>15</sup> Di bawah kepemimpinan Tilmisani (1972-1986), para pembesar Ikhwanul Muslimin mengajukan permohonan akan hak-hak kelompok secara penuh dan pengembalian seluruh aset-aset yang disita pemerintah dalam masa pemerintahan Abdun Nasser. Tilmisani pun memakai strategi menjauhkan Ikhwanul Muslimin dari konflik dengan pemerintah. Ia sering mengulang-ulang pernyataan bahwa pergerakan dakwah Ikhwanul Muslimin harus berjalan dengan hikmah dan menghindari radikalisme serta kekerasan. Pengganti Umar Tilmisani adalah Muhammad Hamid Abu Naser yang tetap menjalankan metode dan strategi pendahulunya. Syaikh Hamid meninggal tahun 1996, sehingga tampuk kepemimpinan Ikhwan dipegang oleh Syaikh Mushtafa Masyhur. Beliau pun tak lama menahkodai Ikhwanul Muslimin karena tahun 2002 meninggal dunia dan penggantinya adalah Syaikh Makmun Hudaibi (meninggal pada hari Jum'at, 9 Januari 2004).

Kedekatan antara Ikhwan dan Anwar Sadat tidak berlangsung lama, karena setelah beberapa tahun, Anwar Sadat menjalankan "liberalisasi" baik di sektor ekonomi, maupun politik. Setelah perang Oktober 1973, Sadat membawa Mesir lebih pro-Barat, khususnya Amerika Serikat, hal ini membuat Ikhwanul Muslimin kecewa. Pada tahun 1979, mereka menggerakkan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan makanan. Pada tahun yang sama, mereka juga menggerakkan demonstrasi di Universitas Minya dan Asyut untuk memprotes Perjanjian *Camp David* dan memprotes diterimanya Syah Iran di Mesir. Pada tahun

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

1981, Presiden Anwar Sadat terbunuh, dan lagi-lagi Ikhwanul Muslimin dituduh terlibat dalam pembunuhan Presiden Sadat.

Pada masa Mubarak (1981 sampai sekarang), aktivitas kelompok Ikhwanul Muslimin hampir tidak berbeda dari sebelumnya. Beberapa gerakan yang menonjol adalah: gerakan menuntut diberlakukannya hukum Islam (*Syari'at Islam*) dan demonstrasi di beberapa tempat yang mengancam Israel dan Amerika Serikat berkaitan dengan konstalasi politik di Timur Tengah yang melibatkan dua negara tersebut.

### **b. Peran Strategis Ikhwanul Muslimin**

Sejak berdirinya Ikhwanul Muslimin (1928), peta politik di Mesir memasuki babak baru. Kebijakan para pemimpin yang berkuasa di Mesir mengalami perubahan dan pasang surut, berkaitan interaksinya dengan Ikhwanul Muslimin. Interaksi Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir penulis petakan dalam dua periode, yaitu pra-revolusi dan pasca-revolusi. *Pertama*, periode pra-revolusi. Pergulatan Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir sering diwarnai adanya konspirasi, penindasan, yang kemudian disambut dengan demonstrasi dan persaingan merebut kekuasaan. Kekuatan mereka yang mengakar, sangat ditakuti pemerintahan Ahmad Mahir Pasha, sehingga berusaha menghalangi Ikhwan dalam persaingan pemilu dengan memalsukan hasil pemilu, menghalangi para calon dan menangkap para aktivis Ikhwanul Muslimin. Kebijakan yang ketat terhadap Ikhwan juga diwarisi oleh pengganti Ahmad Mahir Pasha, al-Nuqrasyi Pasha yang menuduh Ikhwanlah yang berada di balik pembunuhan Ahmad Mahir Pasha. Kebijakan al-Nuqrasyi Pasha ini berbuntut demonstrasi yang dilakukan Ikhwanul Muslimin, yang membuahkan hasil dengan mundurnya al-Nuqrasyi pada tanggal 15 Pebruari 1946.

Berkaca dari kepemimpinan dua generasi Ahmad Mahir Pasha dan al-Nuqrasyi Pasha yang dinilai gagal, Ismail Shidqi Pasha yang menggantikan al-Nuqrasyi berusaha mengakomodir aspirasi Ikhwanul Muslimin. Strategi kepemimpinannya,

dengan mendekati Ikhwan dan mengajak tokohnya untuk bekerjasama. Hal ini memang menguntungkan pemerintah, namun justru merugikan Ikhwanul Muslimin yang menghadapi serangan dan fitnah keji yang dilancarkan oleh partai Wafd dan Komunis. Mereka juga menuduh Ikhwanul Muslimin memihak pemerintahan Shidqi Pasha, padahal mereka selamanya akan selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah.

*Kedua*, periode pasca-revolusi. Ada tiga pemerintahan di Mesir yang melibatkan Ikhwanul Muslimin pasca revolusi ini; baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melalui interaksi konfrontatif-radikal maupun moderat. *Pertama*, Era Gamal Abdunnasser. Meskipun Nashr dan revolusi pada awalnya mendapat dukungan dari Ikhwanul Muslimin, usai revolusi Ikhwanul Muslimin menentanginya setelah terbukti bahwa Nasser tidak berniat mendirikan negara Islam, tetapi mempromosikan nasionalisme dan sosialisme Arab sekuler. Ketika hubungan dengan Ikhwanul Muslimin memburuk, pemerintah dan Ikhwanul Muslimin terlibat dalam peperangan sporadis yang dalam beberapa kesempatan meledak menjadi tindak kekerasan. Akhirnya, pada 1966, Nasser bertindak tegas menumpas Ikhwanul Muslimin sampai ke akar-akarnya, menghukum mati Sayyid Qutb, ideolog utamanya dan tokoh-tokoh lain, menahan dan memenjarakan beribu-ribu orang, serta mengejar anggota lain hingga mereka bersembunyi atau lari ke pengasingan. Menjelang akhir periode Nasser, negara telah membelenggu lembaga keagamaan dan membungkam oposisi Islam, termasuk Ikhwanul Muslimin.

*Kedua*, era Anwar Sadat, yang memerintah dari tahun 1971 hingga 1981, mewarisi Mesir dari tangan Nasser. Dia meraih kekuasaan ketika Arab mulai bangkit dari keterpurukannya tahun 1967 dan setelah kematian Nasser. Sadat sadar akan kondisi ini, sehingga ia berusaha membentuk identitas dan legitimasi politiknya sendiri, memanfaatkan Islam untuk menyingkirkan pengaruh kekuasaan kubu Nasseris dan kelompok kiri. Namun, kebijakan akomodatif Sadat ternyata tidak berlangsung lama,

otoriterisme kembali menyelimuti Sadat dan penindasan terhadap para penentangannya semakin luas, termasuk para pengkritik kebijakan-kebijakan dalam negeri maupun luar negerinya. Tindakan keras ini mencapai puncaknya pada 1981, ketika Sadat memenjarakan lebih dari 1500 orang dari berbagai lapisan masyarakat; aktivis Islam, pengacara, dokter, wartawan, dosen universitas, penentang politik dan mantan menteri pemerintahan. Penahanan-penahanan itu menyulut perlawanan Islam yang semakin radikal, dan akhirnya berpuncak pada pembunuhan Anwar Sadat, pada 3 November 1981 oleh para anggota Jamaah al-Jihad ketika dia sedang meninjau parade militer memperingati perang 1973.

*Ketiga*, Husni Mubarak, yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden, tampil mengisi jabatan presiden dengan semangat dan strategi baru. Gaya Presiden Mubarak, maupun gaya kebangkitan Islam mengalami perubahan pada 1980-an setelah kematian Sadat. Jika kebangkitan Islam selama tahun 1970-an tampil sebagai gerakan konfrontasi dan kekerasan, pada tahun 1980-an gerakan-gerakan Islam masuk ke dalam arus utama dan pelembagaan aktivitas Islam.

Kebijakan Mubarak lebih hati-hati, dengan mengupayakan langkah liberalisasi politik dan toleransi, sementara pada saat yang sama dia mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap pihak-pihak yang ingin kembali menggunakan kekerasan untuk menentang otoritas pemerintah. Secara lebih hati-hati dia memisahkan antara pembangkang agama, pembangkang politik dan ancaman-ancaman langsung bagi negara. Pemerintahan Mubarak lebih akomodatif dalam menghadapi para oposisinya, memberikan ruang kepada mereka untuk menyalurkan aspirasinya. Ia menilai bahwa Ikhwanul Muslimin dan para oposisi agama lain merupakan bukti kebangkitan Islam, sekaligus sebuah pencarian format relasi mereka dengan negara.

### C. Simpulan

Ikhwanul Muslimin merupakan induk dan sumber inspirasi bagi banyak organisasi Islamis di Mesir dan di beberapa negara Arab lainnya, termasuk Suriah, Sudan, Yordania, Kuwait, Yaman, dan sebagian negara di Afrika Utara. Organisasi ini semula dinyatakan sebagai suatu jamaah yang murni filantropis, yang bertujuan menyebarkan moral Islam dan amal baik. Akan tetapi, bagaimanapun kemunculannya merupakan reaksi yang menyebar luas terhadap berbagai perkembangan mengkhawatirkan yang melanda seluruh Dunia Muslim. Beberapa negara Arab yang tunduk dalam wilayah jajahan Eropa, dan usaha untuk mendirikan kekhalifahan, yang dihapus di Turki pada 1924, gagal dilakukan pada 1926.

Sehingga, Ikhwanul Muslimin menjadi media yang efektif bagi perubahan sosial dan politik; dengan mendorong kemerdekaan Mesir dari penjajahan asing, mengembangkan lembaga-lembaga sosial ekonomi alternatif dan berpartisipasi dalam proses politik. Mereka mengakomodir anggota mulai dari kelas menengah bawah sampai kelas menengah atas (pengusaha, birokrat, dokter, insinyur dan wartawan). Mereka terlibat dalam serangkaian aktivitas sosial politik, dari mulai mendirikan perhimpunan-perhimpunan amal Islam (*Jam'iyah Khayriyah*) hingga berperan serta dalam parlemen dan organisasi profesi. Jaringan kelembagaan mereka yang mencakup masjid, rumah sakit, panti asuhan, organisasi pemuda, lembaga bantuan hukum, sekolah, bank, penerbitan dan program lainnya menjadi sarana yang efektif untuk merealisasikan peran Ikhwanul Muslimin.

Sasaran utama Ikhwan bersifat sosial dan politik; di satu sisi menganjurkan perbuatan baik, sedekah dan pembangunan, dan di sisi lain memerjuangkan nasionalisme, kemerdekaan, dan negara Islam. Untuk mencapai target sasaran itu, strategi yang digunakan oleh kelompok-kelompok dalam Ikhwan beragam, dari aktivitas dan akomodasi politik pro pemerintah sampai ke militansi dan pembunuhan, serta kekerasan anti rezim; dari pembangunan

lembaga filantropis dan ekonomi sampai akomodasi dengan partai-partai politik oposisi.

Walaupun beberapa pemikir mengatakan bahwa Islam dan nasionalisme secara teoritis dipandang sebagai terpisah satu sama lain, kenyataannya Ikhwan menjalankan keduanya secara bersamaan. Menurut Ikhwan, Mesir adalah bagian dari bangsa Arab (*wāḥān*) keseluruhan, dan mereka yakin ketika bertindak demi Mesir, juga bertindak demi Arab, Timur dan Islam.

Baik berorientasi sosial atau politik, jaringan kelembagaan Ikhwanul Muslimin telah mengisi suatu kevakuman (pelayanan sosial) dan dengan demikian merupakan kritik tidak langsung terhadap ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang memadai, terutama bagi sektor masyarakat bawah. Pelayanan Ikhwanul Muslimin lebih terasa bagi masyarakat, ketimbang pemerintah. Dr. Sa'duddin Ibrahim memberikan kesaksian menarik tentang hal itu, dengan mengatakan bahwa peran yang dimainkan oleh Ikhwanul Muslimin ini nyatanya mulai memberikan pilihan-pilihan alternatif Islami yang kongkrit bagi lembaga sosial ekonomi masyarakat, daripada negara dan sektor kapitalis. Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial Islam dikelola secara lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga pemerintah, mereka tidak terlalu birokratis dan lebih manusiawi. Mereka lebih berorientasi ke masyarakat akar rumput, jauh lebih murah dan jauh lebih sederhana dibandingkan lembaga-lembaga pemerintah yang didirikan di bawah kebijakan *infatih* (pintu terbuka)-nya Anwar Sadat.<sup>16</sup>

Fenomena ini merupakan kritikan reaktif yang menyengat pemerintah, dan kesaksian publik atas efektivitas gerakan-gerakan Islam dalam menanggapi krisis-krisis sosial yang terjadi. Ketika pada Oktober 1992 mereka, bukannya pemerintah, menjadi pihak pertama yang memberikan tanggapan sigap atas bencana gempa bumi yang sangat dahsyat.

---

<sup>16</sup> Sa'duddin Ibrahim, "Egypt's Islamic Activism in the 1980's", *Third World Quarterly*, 10: 2, April 1988, hlm.643.

Ikhwanul Muslimin juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap organisasi-organisasi profesi dan aktivis pergerakan. Dengan bekerja dalam sistem politik yang ada, para aktivis Ikhwanul Muslimin menuliskan kritikan dan tuntutan dalam rangka menyerukan demokrasi yang lebih besar, perwakilan politik yang lebih aspiratif, keadilan sosial dan membela kepentingan masyarakat.

Ikhwanul Muslimin juga mendirikan perusahaan, pabrik, sekolah, dan rumah sakit sendiri, serta menyusup ke berbagai organisasi, termasuk serikat dagang dan angkatan bersenjata. Penyusupan Ikhwan sedemikian rupa sehingga menjelang akhir 1940-an organisasi ini hampir menjadi "negara dalam negara". Ikhwan juga melancarkan serangan terhadap Inggris dan kepentingan Yahudi di Mesir.

Kekuatan Ikhwanul Muslimin yang sangat kuat dan mencakup semua lapisan masyarakat ini, nyatanya memberikan pengaruh yang besar terhadap pemerintah Mesir. Mulai dari Gamal Abdunnasser, Anwar Sadat, dan sekarang Husni Mubarak, mau tidak mau harus mempertimbangkan kekuatan Ikhwanul Muslimin yang selalu menjadi lembaga kontrol bagi kebijakan mereka. Sekali kebijakan itu menyimpang dari aspirasi umat, maka Ikhwanul Muslimin akan menjadi garda depan dalam memprotes kebijakan itu; baik dengan sikap yang akomodatif maupun konfrontatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna, Imam Hasan, *Muẓākirāt al-Ikhwān al-Muslimīn ilā Waz̄ir al-Adl fī Wujūb al-Amal bi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Dār asy-Syihab, t.t.
- Majmu'ah Rasāil al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna: Hal Nabnu Qaumun 'Amaliyyun*, Al-Muassasah Al-Islamiyyah, 1979.
- al-Wa'iy, Taufiq Yusuf, *Pemikiran Politik Kontemporer Ikhwanul Muslimin: Studi Analitis, Observatif, dan Dokumentatif*, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Brown, L. Carl, *Wajah Islam Politik; Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Ummat*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Byrnes, Robert F, "Perubahan dalam Sistem Politik Soviet", dalam Roy C. Macridis, *Perbandingan Politik: Catatan dan Bacaan*, Jakarta: Airlangga, 1992.
- Esposito, John L. *Dunia Islam Modern*, jilid II, Bandung: Mizan, 2001.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Ikhwanul Muslimin; Konsep Gerakan Terpadu*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Mitchell, Richard, *The Society of Muslim Brothers (Ikhwanul Muslimin)*, Oxford London: University Press, 1969.
- Sihbudi, Riza, *Bara Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 1991.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Universitas Indonesia: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Edisi II, 2000.
- Yakan, Fathi, *Revolusi Hassan al-Banna; Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Quthb sampai Rasyid al-Ghannusyī* Jakarta: Harakah, 2002.

*halaman ini bukan sengaja dikosongkan*

---